

**ANALISIS MAŞLAĤAH TERHADAP PENDAPAT HAKIM
PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG
KETENTUAN ISBAT TALAK**

SKRIPSI

Oleh

Arrum Aisyah Abdulloh

NIM. C91215107



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Arrum Aisyah Abdulloh
NIM : C91215107
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pendapat Hakim
Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Ketentuan
Isbat Talak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 September 2019

Saya yang menyatakan,



Handwritten signature of Arrum Aisyah Abdulloh.

Arrum Aisyah Abdulloh

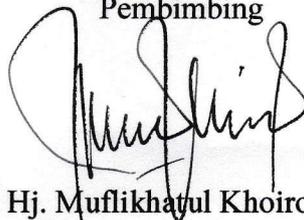
NIM. C91215107

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Masalah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Ketentuan Isbat Talak” yang ditulis oleh Arrum Aisyah Abdulloh NIM. C91215107 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 September 2019

Pembimbing



Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

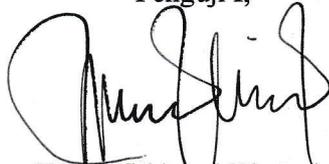
NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi ini yang ditulis oleh Arrum 'Aisyah Abdulloh NIM. C91215107 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Senin 14 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



(Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag)
NIP. 197004161995032002

Penguji II,



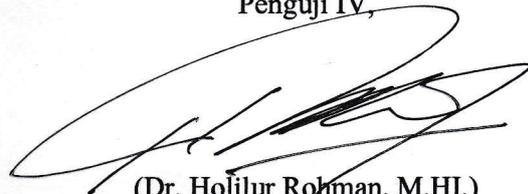
(Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag)
NIP. 197904162006042002

Penguji III,



(Muh. Sholihuddin, M.HI.)
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,



(Dr. Holilur Rohman, M.HI.)
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 18 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arrum 'Aisyah Abdulloh
NIM : C91215107
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ais.arrum@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tipografi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENDAPAT HAKIM
PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG
KETENTUAN ISBAT TALAK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Oktober 2019

Penulis

(Arrum 'Aisyah Abdulloh)

melaksanakan masa iddahnya, namun ketika pasangan tersebut ingin melegalkan perceraian di Pengadilan Agama maka pasangan tersebut dianggap belum bercerai. Dan setelah adanya putusan dari pengadilan sang mantan istri tetap harus menjalankan masa iddah lagi karena talak yang diakui oleh hukum positif adalah talak yang dijatuhkan di depan sidang pengadilan.

Dari fenomena di atas, maka penting adanya kajian mengenai isbat talak sebagai solusi dari talak di luar Pengadilan Agama. Isbat talak dimaksudkan untuk memberi keadilan bagi perempuan. Agar seorang istri tidak menjalankan masa iddah dua kali. Sehingga di pengadilan hanya perlu pemeriksaan jatuhnya talak dan pelaksanaan hak dan kewajiban pasca perceraian. Seperti halnya pernikahan, adanya isbat nikah sebagai upaya mengesahkan pernikahan yang belum dicatatkan di pegawai pencatat nikah. Dalam perkara isbat nikah hanya perlu pemeriksaan pernikahan saja tidak perlu akad dan mahar baru. Penelitian ini fokus terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan berdasarkan peristiwa yang penulis jumpai sendiri yaitu bertempat di Pengadilan Agama Pasuruan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan skripsi yang berjudul “**Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Ketentuan Isbat Talak**”.

dari salah satu pihak (lebih menitik beratkan pada pihak perempuan) dan sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif yang berupa denda karena pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan admisnistrasi yang telah diatur pemerintah. Sedangkan menurut akademisi hukum Islam sanksi bagi pelaku talak di luar Pengadilan Agama adalah sebagai penguat undang-undang dan juga sebagai penguat norma hukum dan sanksi yang diberikan adalah tidak dianggap sah di mata hukum talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.²¹

2. Skripsi dengan judul *Perceraian Di Luar Prosedur Peradilan Agama Di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya* oleh Dede Rohyadi tahun 2008 dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang perceraian yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama yang mana masyarakat Sodonghilir mengetahui tentang hukum atau peraturan yang mengatur mengenai masalah perceraian, tetapi tidak mengetahui dengan pasti diatur dalam undang-undang, pasal dan ayat berapa, hanya saja untuk mematuhi hukum yang berlaku masih sangat minim sekali karena dalam masyarakat Sodonghilir perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama sudah merupakan suatu adat kebiasaan sehingga masyarakat dapat menerimanya.²²
3. Jurnal hukum dengan judul *Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilaan (Penelitian Di Kota Langsa)* oleh Vivi Hayati tahun 2015. dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang dampak yang terjadi ketika perceraian dilakukan

²¹Muhammad Yalis Shokhib, *Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif Dan Akademisi Hukum Islam Di Kota Malang)* (Tesis-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), v.

²²Dede Rohyadi, *Perceraian Di Luar Prosedur Peradilan Agama Di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya* (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), v.

- 1) *Maṣlahah Al-Ḍarūriyah* yaitu *maṣlahah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Jika *kemaṣlahatan* ini tidak ada maka timbul kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, mereka akan hilang keselarasan dan kebahagiaan di akhirat. *Kemaṣlahatan* seperti ini ada lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Yang pertama disyariatkan untuk berjihad dan membunuh orang-orang murtad, yang kedua menjaga jiwa disyariatkan untuk menegakkan *qiṣaṣ* bagi orang-orang yang membunuh, yang ketiga dalam menjaga akal yaitu disyariatkan tidak meminum minuman keras, yang keempat dalam menjagaharta disyariatkan untuk tidak mencuri dan menghukum orang yang mencuri dengan potong tangan, dan yang terakhir dalam menjaga keturunan disyariatkan menghukum orang-orang yang berzina. Dan dari semua yang disyariatkan tersebut sejalan dengan tujuan syarak yang dapat diterima akal sehingga bisa disebut dengan *maṣlahah*.
- 2) *Maṣlahah al-Hājiyah* yaitu sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk memudahkannya dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan untuk memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan. Seperti syariat dalam jual beli yang ada beberapa macam, dan beberapa *rukṣah* (keringanan) dalam mengqosor dan menjama' sholat bagi orang yang bepergian, dan diperbolehkan tidak puasa bagi orang yang hamil, menyusui dan

- b) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hak kekuasaan seorang wali dicabut.
 - c) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh kedua orang tuanya.
 - d) Pembebanan kewajiban kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya.
- 5) Penetapan asal-usul anak (Pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 103 KHI).
- 6) Penetapan pengangkatan anak (UUPA No. 3 Tahun 2006)

Adapun perkara-perkara lainnya yang termasuk dalam yuridiksi *contentius* yaitu:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang (izin poligami).
- 2) Pencegahan perkawinan.
- 3) Pembatalan perkawinan.
- 4) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- 5) Perceraian karena talak (cerai talak).
- 6) Gugatan perceraian (cerai gugat).
- 7) Penyelesaian harta bersama (gono-gini).
- 8) Mengenai penguasaan anak.
- 9) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya.

B. Analisis *Maşlahah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Ketentuan Isbat Talak

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang isbat talak yaitu isbat talak tidak perlu ditambahkan dalam aturan perundang-undangan karena dampak jika diadakannya isbat talak akan berakibat banyaknya talak yang dilakukan di luar pengadilan dengan sewenang-wenangnya kemudian dengan mudah mendaftarkan isbat talak ke pengadilan. Jadi peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 cukup menjadi payung hukum atas perkara perceraian yang ada di Indonesia.

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ketentuan isbat talak yang dianalisis dengan teori *maşlahah*.

Dalam Bab II penulis telah memaparkan kajian umum tentang *maşlahah* yang terbagi dalam tiga jenis yaitu:

1. *Maşlahah* dilihat dari segi kualitas dan kepentingan *maşlahah*
2. *Maşlahah* dilihat dari segi keberdaan *maşlahah*
3. *Maşlahah* dilihat dari segi cakupan atau jangkauan *maşlahah*.

Ditinjau dari perspektif *maşlahah* maka diwajibkan bagi setiap warga Indonesia untuk melaksanakan talak di hadapan pengadilan dan tidak perlu isbat talak karena jika adanya isbat talak maka akan terjadi perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh para pihak dan dengan mudah mendaftarkan isbat talaknya tersebut. Hal ini masuk dalam *maşlahah al-Daruriyah* yaitu *maşlahah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Jika

laki-laki yaitu membayar nafkah idah, nafkah mut'ah, dan nafkah hadlanah. Syariat-syariat inilah yang harus dijalankan oleh manusia dalam menjaga agama.

2. Dalam menjaga jiwa (*hifzu al-nafsi*) wajibnya talak di hadapan sidang pengadilan dimaksudkan untuk menjaga kehidupan mantan istri dengan mewajibkan bagi suami untuk membayar nafkah idah. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di dalam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan di syariatkan nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa ini berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya berpidah kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa idah. Dalam menjalankan masa idah wajib bagi suami untuk membayar nafkah idah dikarenakan tanpa adanya nafkaah idah maka mantan istri akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah.
3. Dalam menjaga nasab (*hifzu al-nasli*) wajibnya talak di hadapan sidang pengadilan dimaksudkan untuk menjaga keturunan dari setiap manusia. Dilaksanakannya talak dihadapan sidang pengadilan dimaksudkan pengadilan ssebagai saksi terjadinya talak tersebut sehingga putus sudah suatu ikatan pernikahan dan dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Sehingga keturunan-keturunan yang lahir jelas bernasab kepada siapa anak tersebut.

